

ABSTRAK

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM PERSPEKTIF BERINVESTASI DI INDONESIA

Aldy Mirozul (2310622041), dibimbing oleh Diani Sadia Wati sebagai Pembimbing Utama, Aurora Jelinia Meliala sebagai Pembimbing Pendamping.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai strategi meningkatkan ekosistem investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan perizinan berusaha. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menghadapi sejumlah kendala, seperti belum optimalnya integrasi kewenangan antar instansi, kesulitan dalam pemenuhan persyaratan dasar, ketidaksesuaian klasifikasi risiko antar sektor, serta hambatan teknis pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada minat investasi, khususnya investor asing. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan kebijakan tersebut dengan pendekatan hukum normatif dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi, implementasinya masih menyisakan kelemahan kelembagaan dan substansi. Kelemahan kelembagaan mencakup koordinasi yang lemah dan tumpang tindih kewenangan, sementara dari sisi substansi terlihat dalam norma yang tidak konsisten dan regulasi turunan yang belum selaras. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan regulasi perlu dilakukan untuk menjamin efektivitas dan mendukung iklim investasi yang kondusif.

Kata kunci: perizinan berbasis risiko, kepastian hukum, investasi

ABSTRACT

RISK-BASED BUSINESS LICENSING IN THE PERSPECTIVE OF INVESTING IN INDONESIA

Aldy Mirozul (2310622041), guided by Diani Sadia Wati as Main Mentor, Aurora Jelinia Meliala as Mentor Companion.

Abstract

The Government of Indonesia enacted Law Number 6 of 2023 on Job Creation as a strategic measure to enhance the investment ecosystem and create employment opportunities by simplifying business licensing procedures. One of its key policies is the implementation of Risk-Based Business Licensing as regulated in Government Regulation Number 5 of 2021. However, in practice, this policy faces several challenges, including suboptimal integration of authority among institutions, difficulties in fulfilling basic requirements, inconsistencies in risk classification across sectors, and technical issues within the Online Single Submission (OSS) system. These problems have resulted in legal uncertainty, particularly affecting the confidence of foreign investors. This study aims to examine the implementation of the risk-based licensing system using a normative legal research method and a statutory approach. The findings indicate that despite its goal of ensuring legal certainty and administrative efficiency, the implementation still suffers from institutional and substantive weaknesses. Institutional issues include poor coordination and overlapping authority, while substantive issues relate to inconsistent regulatory norms and the lack of harmonization in implementing regulations. Therefore, a regulatory evaluation and revision are necessary to improve the effectiveness of the system and foster a more conducive investment climate in Indonesia.

Keywords: risk-based licensing, legal certainty, investment